



ANGGARAN DASAR IKATAN KELUARGA ALUMNI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FKIP UAD

MUKADIMAH

Alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta adalah bagian substansial dari almamater dan dengan semangat kekeluargaan dan keilmuan mengabdikan kepada rakyat, bangsa dan negara berdasarkan prinsip-prinsip Tridharma Perguruan Tinggi.

Alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya, menyadari akan tanggung jawabnya untuk ikut serta mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menyadari akan kedudukan dan fungsi para alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta kepada masyarakat dan almamater, maka dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta bertekad melanjutkan dan mengembangkan organisasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

BAB I NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, BENDERA DAN LAMBANG

Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan disingkat IKA Prodi BK FKIP UAD.

Pasal 2 WAKTU

IKA Prodi BK FKIP UAD berjalan selama 3 tahun dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 3 KEDUDUKAN

IKA Prodi BK FKIP UAD berpusat di tempat kedudukan kampus II UAD Jalan Pramuka 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161.

Pasal 4 BENDERA DAN LAMBANG

Bendera dan Lambang IKA Prodi BK FKIP UAD adalah bendera dan lambang Universitas Ahmad Dahlan ditambah dengan tulisan Ikatan Keluarga Alumni Prodi BK FKIP UAD.



BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5 ASAS

IKA Prodi BK FKIP UAD berasaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, Pancasila, dan UUD 1945.

Pasal 6 SIFAT

IKA Prodi BK FKIP UAD bersifat kekeluargaan, berorientasi kepada pengabdian masyarakat dan almamater.

Pasal 7 TUJUAN

IKA Prodi BK FKIP UAD didirikan dengan tujuan:

1. Membina dan mengembangkan semangat kekeluargaan dan keilmuan antar anggota IKA Prodi BK FKIP UAD dan unsur sivitas akademika.
2. Membantu almamater dalam melaksanakan misi Program Studi Bimbingan dan Konseling UAD.
3. Memelihara dan menjunjung tinggi nama Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan rakyat, bangsa dan negara dalam Layanan Bimbingan dan Konseling.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 8 KEANGGOTAAN

Anggota Ikatan Keluarga Alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling adalah lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD terdiri atas:

- a. Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat
- b. Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah.

Pasal 10 PENGURUS IKA BK UAD PUSAT

1. Pengurus Tingkat Program Studi adalah penyelenggara organisasi di tingkat Program Studi Bimbingan dan Konseling.



2. Pengurus Tingkat Program Studi terdiri atas Pengurus Lengkap dan Pengurus Harian.
3. Ketua dan wakil ketua dipilih dengan mufakat dan musyawarah
4. Pemilihan kepengurusan IKA Prodi BK FKIP UAD diberikan hak prerogratif kepada ketua

Pasal 11
PENGURUS IKA PRODI BK FKIP UAD WILAYAH

1. Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah adalah Penyelenggara organisasi di tingkat propinsi dan berkedudukan di Ibukota Propinsi dengan meliputi wilayah kerja seluruh propinsi/kota bersangkutan.
2. Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah hanya dapat dibentuk apabila dalam wilayah kerjanya terdapat sekurang-kurangnya sepuluh (10) orang Anggota Biasa.
3. Pembentukan Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah dilaporkan ke Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat untuk disahkan secara administratif.

Pasal 12
MASA BAKTI PENGURUS

Masa Bakti Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Tingkat Program Studi, Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 13
PEMBATASAN MASA BAKTI KETUA UMUM IKA BK UAD TINGKAT PROGRAM STUDI

Paling lama seseorang dapat menjabat sebagai Ketua Umum IKA Prodi BK FKIP UAD di semua jenjang/tingkat kepengurusan adalah 2 (dua) periode masa bakti yang ditetapkan dalam dan/atau oleh Musyawarah Pusat.

BAB V
KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 14
KEKUASAAN TERTINGGI ORGANISASI

Kekuasaan tertinggi Ikatan Keluarga Alumni Program Studi Bimbingan dan Konseling UAD berada pada Musyawarah Pusat Program Studi Bimbingan dan Konseling.

BAB VI
KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 15
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Keuangan dan kekayaan IKA Prodi BK FKIP UAD diperoleh dari:

1. Iuran anggota.
2. Bantuan yang bersifat tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan IKA Prodi BK FKIP UAD.



BAB VII KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16 KONGRES

1. Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada Organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD.
2. Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD berwenang untuk:
 - a. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA Prodi BK FKIP UAD.
 - b. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan dari Garis-garis Besar Program Kerja IKA Prodi BK FKIP UAD.
 - c. Meminta dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat periode sebelumnya.
 - d. Memilih Ketua Umum Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat periode berikutnya.
3. Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD mensahkan keanggotaan Dewan Pertimbangan IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat yang diusulkan oleh utusan-utusan IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat dan Wilayah
4. Peserta yang dapat mengikuti Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD adalah Utusan-utusan Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat dan IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang mendapat mandat dan kekuasaan penuh dari Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD yang bersangkutan.
5. Jumlah Peserta Peninjau dari tiap-tiap Pengurus yang dapat mengikuti Musyawarah IKA Prodi BK FKIP UAD ditentukan oleh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat melalui Panitia Pelaksana Musyawarah IKA Prodi BK FKIP UAD.
6. Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat.
7. Dalam hal Pengurus Pusat memandang perlu dilakukan pertemuan nasional, dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Musyawarah Kerja Nasional dalam 1 (satu) periode Pengurus Pusat.

Pasal 17 RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat kepengurusan IKA Prodi BK FKIP UAD terdiri dari:

1. Rapat Pengurus Lengkap IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam satu tahun
2. Rapat Pengurus Harian IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat setiap waktu dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan yang dianggap perlu oleh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD.
3. Rapat Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18 KEKUASAAN MENGUBAH ANGGARAN DASAR

Kekuasaan dan wewenang untuk merubah Anggaran Dasar IKA Prodi BK FKIP UAD hanya ada pada Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD dan sekurang-kurangnya



diputuskan oleh 2/3 suara dari jumlah utusan yang hadir pada Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD tersebut.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 19 PROSEDUR PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD hanya dapat dilakukan dengan suatu Kongres Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah utusan dengan mandat penuh dari Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang masing-masing memperoleh mandat penuh dari anggotanya.
2. Keputusan pembubaran organisasi harus diputuskan dan disetujui oleh 2/3 suara dari seluruh utusan yang hadir.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

PASAL 20 KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Anggaran Dasar IKA Prodi BK FKIP UAD ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar IKA Prodi BK FKIP UAD ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA Prodi BK FKIP UAD.

Ditetapkan dan disahkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 13 Juli 2019

Ketua

Sekretaris

.....
.....

.....
.....

Mengetahui,

Wakil Dekan FKIP UAD

Kaprodi BK FKIP UAD

Dr. Dody Hartanto, M.Pd
NIY. 60090563

Irvan Budhi Handaka, S.Pd.,M.Pd
NIY. 60120715



ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN KELUARGA ALUMNI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FKIP UAD

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Setiap lulusan mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan secara langsung diterima menjadi Anggota Biasa IKA Prodi BK FKIP UAD.
2. Berhentinya keanggotaan IKA Prodi BK FKIP UAD dapat terjadi karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan dari keanggotaan.
3. Pemberhentian keanggotaan IKA Prodi BK FKIP UAD hanya dapat dilakukan melalui suatu rapat Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat yang melibatkan Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah.
4. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri di dalam forum Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD atau forum lain yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut oleh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat.

Pasal 2 HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa IKA Prodi BK FKIP UAD berhak untuk:
 - a. Menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan IKA Prodi BK FKIP UAD kepada Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD di semua jenjang atau tingkat kepengurusan sesuai dengan status asal keanggotaannya.
 - b. Menghadiri dan mengikuti semua kegiatan organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD.
 - c. Memilih dan dipilih untuk jabatan di semua jenjang atau tingkat kepengurusan dalam organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD sesuai dengan status asal keanggotaannya.
 - d. Meminta pertanggungjawaban Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD sesuai dengan tata cara dan saluran yang ditetapkan oleh organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan IKA Prodi BK FKIP UAD mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa IKA Prodi BK FKIP UAD, kecuali hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD di semua jenjang atau tingkat kepengurusan, tetapi dapat menjadi anggota Badan Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD.

Pasal 3 KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan IKA Prodi BK FKIP UAD berkewajiban:



1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan semua ketentuan organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD.
2. Menjaga nama baik IKA Prodi BK FKIP UAD dan Universitas Ahmad Dahlan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 4 PENGURUS IKA PRODI BK FKIP UAD PUSAT

Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang merangkap sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Harian IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat dan dipilih dalam Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD.

Pasal 5 SUSUNAN PENGURUS HARIAN IKA PRODI BK FKIP UAD

1. Badan Pengurus Harian IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat terpilih.
2. Susunan Badan Pengurus Harian IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Sekurang-kurangnya seorang Ketua
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal
 - d. Sekurang-kurangnya seorang Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara Umum
 - f. Sekurang-kurangnya seorang Bendahara
 - g. Sekurang-kurangnya seorang Ketua Bidang
3. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat diatur dalam Tata Tertib Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD yang disahkan oleh Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD yang bersangkutan.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS IKA PRODI BK FKIP UAD PUSAT

Hak dan kewajiban Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat adalah:

1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat.
2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja IKA Prodi BK FKIP UAD hasil Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD.

Pasal 7 DEWAN PERTIMBANGAN IKA PRODI BK FKIP UAD PUSAT

1. Anggota Dewan Pertimbangan IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat terdiri atas:
 - a. Tokoh-tokoh senior yang peduli terhadap IKA Prodi BK FKIP UAD dari masing-masing Wilayah yang diusulkan dan disahkan dalam Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD.
 - b. Ketua Program Studi secara *ex officio*.



2. Ketua Dewan Pertimbangan IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Pertimbangan IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PERTIMBANGAN IKA PRODI BK FKIP UAD PUSAT

1. Memberikan saran-saran kepada Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD di semua jenjang atau tingkat kepengurusan.
2. Melakukan telaah lebih mendalam atas semua kebijaksanaan eksternal Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat yang mengatasnamakan Alumni IKA Prodi BK FKIP UAD.
3. Memberikan teguran kepada Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat, apabila kebijakan yang dilakukannya menyimpang dari ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD.
4. Mengundang Rapat Lengkap Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat.

Pasal 9

PENGURUS IKA PRODI BK FKIP UAD WILAYAH

1. Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih oleh Musyawarah IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang bersangkutan.
2. Susunan Pengurus Harian IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah terpilih dan terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Seorang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Seorang Wakil Bendahara
 - g. Ketua-ketua Bidang.
3. Apabila dipandang perlu Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah dapat membentuk satu satuan organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang bersifat khusus pada setiap Kabupaten. Penanggungjawab satuan organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang bersifat khusus tersebut menjadi Anggota Pleno dari Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang bersangkutan.
4. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang disahkan oleh Musyawarah IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS IKA PRODI BK FKIP UAD WILAYAH

Hak dan kewajiban Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah adalah:

1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah



ditetapkan oleh Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD dan Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat.

2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah hasil Musyawarah IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD dan Musyawarah IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah.

BAB III KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 11 KEUANGAN

1. Ketentuan tentang besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Harian IKA Prodi BK FKIP UAD.
2. Uang iuran dipungut dan dikelola oleh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Fakultas dan Wilayah yang bersangkutan.
3. Besarnya persentase bagian uang iuran yang harus dikirimkan ke Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat ditetapkan dalam Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD.
4. Untuk kepentingan organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD, Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD dapat membentuk badan usaha yang bertanggungjawab kepada Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD yang bersangkutan.

Pasal 12 KEKAYAAN

Apabila organisasi IKA Prodi BK FKIP UAD dibubarkan, maka segala aset kekayaan yang dimiliki oleh IKA Prodi BK FKIP UAD diserahkan kepada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13 KONGRES IKA PRODI BK FKIP UAD

1. Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat.
2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat.
3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD selambat-lambatnya dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat yang diatur dalam Anggaran Dasar IKA Prodi BK FKIP UAD berakhir.
4. Utusan IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang menghadiri Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD ditunjuk dalam suatu rapat Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD yang bersangkutan dan hanya sah apabila membawa surat mandat dari masing-masing Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD yang bersangkutan tersebut.
5. Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat melalui Panitia Pelaksana berwenang untuk menentukan jumlah Peserta Peninjau dari setiap Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD di semua jenjang/tingkat kepengurusan



dan Peserta Peninjau yang khusus diundang untuk Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD tersebut.

6. Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah seluruh utusan dengan mandat penuh dan 1/2 jumlah seluruh utusan dengan mandat penuh dari Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah.
7. Apabila sampai waktu pembukaan Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD, jumlah utusan yang hadir tidak mencapai syarat kesahan, maka Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD diundur sampai waktu yang disepakati bersama dan setelah itu Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah utusan yang hadir.
8. Semua keputusan yang diambil dalam Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD didasarkan atas azas musyawarah untuk mufakat.
9. Bila sidang menetapkan untuk mengadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
10. Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa periode kepengurusan.

Pasal 14

MUSYAWARAH WILAYAH IKA PRODI BK FKIP UAD

1. Musyawarah Wilayah IKA Prodi BK FKIP UAD diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah tersebut.
2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah.
3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah Wilayah IKA Prodi BK FKIP UAD selambat-lambatnya dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah yang diatur dalam Anggaran Dasar IKA Prodi BK FKIP UAD berakhir.
4. Jumlah Utusan, Hak Suara dan kesahan serta tata-cara pelaksanaan Musyawarah Wilayah IKA Prodi BK FKIP UAD ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA Prodi BK FKIP UAD Wilayah dan/atau dalam Musyawarah Wilayah IKA Prodi BK FKIP UAD yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Kongres IKA Prodi BK FKIP UAD.
5. Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Wilayah IKA Prodi BK FKIP UAD dilaksanakan maka semua hasil dari Musyawarah Wilayah IKA Prodi BK FKIP UAD tersebut sudah harus dilaporkan kepada Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat.

Pasal 15

RAPAT-RAPAT

1. Rapat-rapat rutin IKA Prodi BK FKIP UAD:
 - a. Rapat IKA Prodi BK FKIP UAD dianggap sah bila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah Peserta yang diundang.
 - b. Apabila sampai waktu dimulainya rapat persidangan, jumlah peserta yang hadir tidak mencapai syarat kesahannya, maka rapat IKA Prodi BK FKIP UAD diundur sampai waktu yang disepakati bersama, dan setelah itu rapat IKA Prodi BK FKIP UAD dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir.
2. Rapat-rapat khusus Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat



- a. Rapat-rapat khusus Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat external mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni Prodi BK FKIP UAD akan dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD
- b. Dalam hal mendesak atau luar biasa dimana rapat-rapat ini tidak mungkin diadakan maka maksimal 2 X 24 Jam setelah Pengurus IKA Prodi BK FKIP UAD Pusat mengeluarkan keputusan yang bersifat eksternal mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni Prodi BK FKIP UAD, rapat khusus ini harus segera diadakan untuk menjelaskan keputusan yang telah diambil tersebut.
3. Keputusan rapat-rapat IKA Prodi BK FKIP UAD diambil secara musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak berhasil keputusan rapat diambil atas dasar suara terbanyak.
4. Keputusan mengenai pemilihan dan atau pembahasan yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seorang anggota diambil secara bebas dan rahasia.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16 KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga IKA Prodi BK FKIP UAD ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga IKA Prodi BK FKIP UAD ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga IKA Prodi BK FKIP UAD akan ditinjau apabila ada sesuatu hal yang dirasa perlu untuk dirubah.

Ditetapkan dan disahkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 13 Juli 2019

Ketua

Sekretaris

.....
.....

.....
.....

Wakil Dekan FKIP UAD

Mengetahui,

Kaprodi BK FKIP UAD

Dr. Dody Hartanto, M.Pd
NIY. 60090563

Irvan Budhi Handaka, S.Pd., M.Pd
NIY. 60120715